

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA PEMBANGUNAN PEDESAAN DI KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA

Zaka Nurfahruddin^{1✉}, Edy Yusuf Agung Gunanto²

^{1,2}Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

✉Email: nurfahruddinzaka@gmail.com

Abstract

This study aims to describe how the management of the Village Fund (VF) and Village Fund Allocation (VFA) carried out in Donorojo Subdistrict, Jepara Regency whether it is in accordance with applicable procedures, the role of the Village Fund and the Village Fund Allocation in rural development, as well as the factors influence the implementation of the Village Fund (VF) and Village Fund Allocation (VFA) policies. This study uses a qualitative descriptive approach, with the aim of being able to describe or give an idea of the object under study. The object of this study is the Village Head, Village Officials, the District Head, and Other Village Institutions as resource persons or informants. Data analysis methods used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the management of the Village Fund and the Village Fund Allocation in Donorojo Subdistrict have been quite good, although the disbursement of funds and accountability reporting has been delayed. In managing VF and VFA, community participation is quite good. VF and VFA also had a good influence on development in Donorojo District. In addition, there are factors that influence the implementation of the Village Fund and Village Fund Allocation policies, including communication, resources, pelaksana attitude, bureaucratic structure and the environment.

Keyword: Village Fund Village, Fund Allocation, Rural Development

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu masalah akut dalam pembangunan ekonomi. Menurut Adam Smith tidak ada masyarakat yang makmur dan bahagia, jika sebagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan dan kesengsaraan (Todaro, 2006). Pada tahun 2012, berdasarkan laporan *world development indicator*, 13% masyarakat dunia hidup di bawah garis kemiskinan internasional yaitu 1,90 dollar per hari. Fakta tersebut sebenarnya tidak terlalu buruk mengingat pada tahun 1990 populasi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berada di angka 37%. Namun di sisi lain, fakta menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 24% selama 22 tahun, belumlah cukup untuk menghantarkan masyarakat dunia ke suatu jenjang kesuksesan dalam mengentaskan kemiskinan. Sampai sekarang masih banyak negara, terutama di wilayah Asia dan Afrika yang belum bisa lepas dari masalah kemiskinan.

Salah satu negara yang masih mempunyai masalah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi adalah Indonesia. Selama lebih dari 70 tahun merdeka, Indonesia tidak pernah lepas dari masalah ini. Data menunjukkan dari tahun 1998, angka kemiskinan di Indonesia tidak pernah di bawah 10%, bahkan pada tahun tersebut, tingkat kemiskinan mencapai 24,2 %. Hal ini tentu menjadikan masalah

kemiskinan sebagai masalah yang serius di Indonesia. Berikut adalah data kemiskinan di Indonesia dari tahun 1970 s.d. 2013

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin 1970 s.d. 2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Persentase Penduduk Miskin (dalam persen)
1970	70.00	60.00
1976	54.20	40.10
1978	47.20	33.30
1980	42.30	28.60
1981	40.60	26.90
1984	35.00	21.60
1987	30.00	17.40
1990	27.20	15.10
1993	25.90	13.70
1996	22.50	11.30
1996	34.01	17.47
1998	49.50	24.20
1999	47.97	23.43
2000	38.74	19.14
2001	37.87	18.41
2002	38.39	18.20
2003	37.34	17.42
2004	36.15	16.66
2005	35.10	15.97
2006	39.30	17.75
2007	37.17	16.58
2008	34.96	15.42
2009	32.53	14.15
2010	31.02	13.33
2011	30.02	12.49
2012	29.13	11.96
2013	28.07	11.37

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

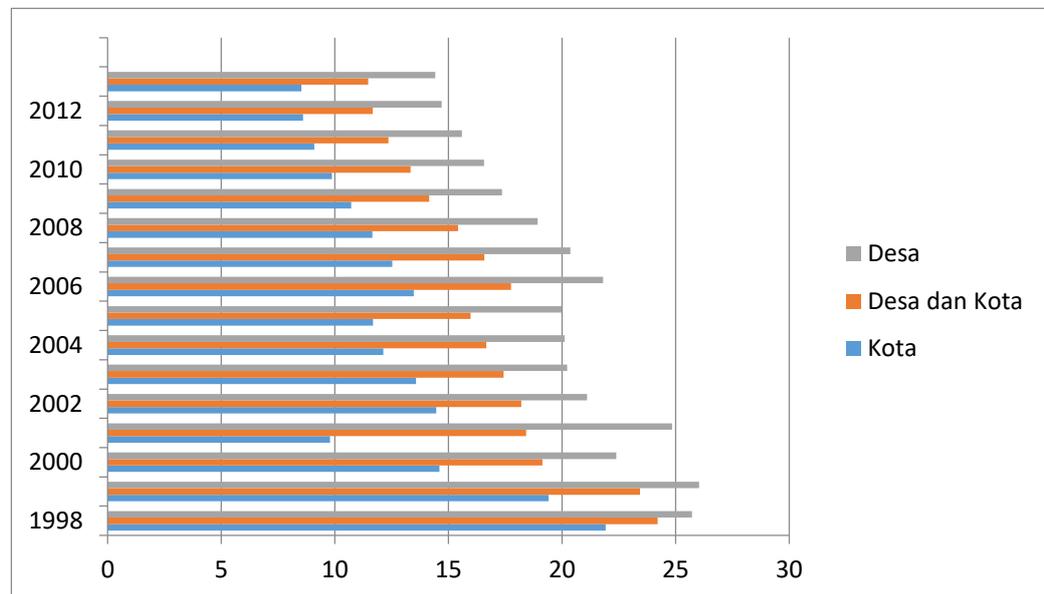
Salah satu hal menarik dari fenomena kemiskinan di Indonesia adalah bahwa masyarakat yang mengalaminya sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Banyaknya penduduk yang tinggal di pedesaan membuat wilayah pedesaan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Apalagi dengan kondisi saat ini secara umum kondisi kehidupan di pedesaan masih berada pada tingkat yang rendah,

utamanya pada sektor ekonomi. Masalah kemiskinan dan kesengsaraan bukanlah wajah yang asing ditemui di wilayah pedesaan di Indonesia.

Kurangnya kemampuan finansial penduduk pedesaan mengakibatkan kurang baiknya kualitas kehidupan mereka yang ditandai dengan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk pedesaan yang dapat digambarkan melalui berbagai indikator antara lain kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan perumahan. Sebagai akibatnya, tingkat kemiskinan pedesaan juga menjadi lebih besar dibandingkan perkotaan.

Data tingkat kemiskinan dipedesaan dan diperkotaan di Indonesia sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2013

Gambar 1
Persentase penduduk miskin yang berada di pedesaan dan perkotaan Indonesia
Periode 1998-2013 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Kemiskinan di Indonesia selalu didominasi oleh kemiskinan yang berada di pedesaan, bahkan sampai data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Selain itu, selama periode September 2014–Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang, dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015, sementara di daerah pedesaan naik sebanyak 0,57 juta orang, dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015.

Data yang dipublikasikan BPS menunjukkan bahwa sebaran penduduk miskin di Indonesia cukup didominasi oleh penduduk yang berada di wilayah pedesaan, dari seluruh jumlah penduduk miskin yang ada 62,74% berada di pedesaan. Oleh karena

itu sangat penting bagi pemerintah untuk menciptakan program-program yang bisa mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan.

Masalah kemiskinan di Indonesia yang banyak di temui di pedesaan, membuat pemerintah mengesahkan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Undang undang tersebut mengatur banyak hal tentang desa, dan salah satunya adalah tentang keuangan desa. Perubahan terbesar mengenai keuangan desa adalah naiknya pos anggaran dana desa dan alokasi dana desa menjadi minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Anggaran dana desa tidak akan serta merta dinaikan menjadi 10%, tetapi akan dilakukan secara bertahap sampai sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. APBN tahun 2015 Dana Transfer ke Daerah mencapai 647 Triliun rupiah, jadi paling tidak seharusnya anggaran dana desa dan alokasi dana desa pada tahun tersebut sebesar 64,7 Triliun rupiah yang akan dibagikan ke 7400 desa. Tahun 2015 implementasi besaran anggaran dana desa masih dalam tahap penyesuaian, jadi dana yang digelontorkan pemerintah baru sekitar 20,776 Triliun. Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak menerima dana desa yaitu sebesar Rp 2,228 triliun, disusul Jawa Timur Rp 2,214 triliun, Aceh Rp 1,707 triliun, Jawa Barat Rp 1,589 triliun, Sumatera Utara Rp 1,461 triliun, dan Provinsi Papua sebesar Rp 1,433 triliun. Penerimaan anggaran dana desa untuk kabupaten Jepara pada tahun 2015 sebesar Rp 55,5 miliar

Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jawa Tengah, sampai dengan Oktober tahun 2015 ada tujuh kabupaten dengan penyerapan dana desa rendah yakni Kendal sebesar 10,89%, Sukoharjo 27,70%, Pekalongan 30,54%, Jepara 32,10%, Brebes 32,19%, Purworejo 33,36%, dan Demak 34,27%.

Salah satu kabupaten dengan penyerapan dana desa yang rendah pada tahun 2015 adalah Kabupaten Jepara. Penyerapan sebesar 32,10% tentu hal ini menjadi masalah yang serius. Tahun 2013 jumlah penduduk miskin di kabupaten Jepara berdasarkan data BPS adalah sebesar 106.441 jiwa atau sama dengan 9,23%. Angka tersebut masih lebih rendah dari angka kemiskinan provinsi Jawa Tengah maupun nasional, kemiskinan harus senantiasa diturunkan dari waktu ke waktu, untuk itu maka pemerintah daerah harus senantiasa mendukung program-program pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya dengan memastikan penyerapan anggaran dilakukan dengan tepat waktu dan tepat guna, agar taraf hidup masyarakat dapat meningkat.

Jepara sebagai daerah yang mayoritas wilayahnya adalah pedesaan seharusnya bisa lebih memperhatikan program-program pemerintah yang langsung menysasar wilayah pedesaan sebagai target pengentasan kemiskinan. Dengan wilayah yang terdiri dari 16 Kecamatan dengan 184 desa dan 11 kelurahan, anggaran dana desa dan alokasi dana desa seharusnya menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.

Penyerapan anggaran dana desa dan alokasi dana desa yang rendah juga terjadi di Kecamatan Donorojo, dari delapan desa yang terdapat di kecamatan Donorojo, tujuh diantaranya mengalam keterlambatan dalam penyerapan anggaran dana desa dan alokasi dana desa.

Penyerapan dana desa dan alokasi dana desa ini tentunya dapat menjadi masalah dalam tata kelola pemerintahan. Anggaran yang berhenti dan tidak terserap tentunya akan merugikan perekonomian. Permasalahan mengenai rendahnya

penyerapan dan keterlambatan anggaran dana desa dan alokasi dana desa di Kabupaten Jepara menjadi sangat penting untuk dipahami dengan baik.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Jepara pada tahun 2017 masih berada di tingkat 8,12%, dari presentase penduduk miskin tersebut sebagian besar berada di wilayah pedesaan, dengan 184 desa dan 11 kelurahan dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat Jepara tinggal di wilayah pedesaan. Semakin tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan maka dibutuhkan stimulus dari pemerintah agar perekonomian di pedesaan dapat lebih baik. Stimulus yang diberikan pemerintah salah satunya adalah dengan adanya anggaran dana desa dan alokasi dana desa yang persentasenya sebesar 10% dari pos anggaran APBN yang ditransfer ke daerah.

Kenyataan di lapangan adalah penyerapan dana desa tersebut seringkali tidak terserap dengan baik apabila dilihat dari sisi waktu penyerapan. Permasalahan keterlambatan penyerapan anggaran selalu menjadi masalah yang tak kunjung terselesaikan. Salah satu kecamatan di kabupaten Jepara yang selalu mengalami keterlambatan dalam penyerapan anggaran dana desa dan alokasi dana desa adalah kecamatan Donorojo. Pada periode terakhir pencairan anggaran dana desa dan alokasi dana desa pada Agustus 2016, 7 dari 8 desa yang ada di Kecamatan Donorojo mengalami keterlambatan. Padahal anggaran dana desa ini digadang gadang dapat membantu mempercepat pembangunan pedesaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Anggaran

Anggaran adalah sesuatu yang mencerminkan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah negara. Anggaran merupakan rencana operasional keuangan yang mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk suatu jangka waktu tertentu sekaligus berisi juga usulan cara untuk membiayai pengeluaran tersebut. Menurut Bachtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar (2002), definisi anggaran terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

1. rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja,
2. gambaran strategis pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan,
3. alat pengendalian,
4. instrumen politik,
5. disusun dalam periode tertentu.

Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi ke dalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Anggaran

Menurut Edward dalam Subarsono (2005) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni

1. Komunikasi, yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya.

2. Sumberdaya yaitu mencakup manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Disposisi (sikap) adalah variabel kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau dispo sisi aparat pelaksana.
4. Stuktur birokrasi yaitu mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data primer adalah data yang diperoleh sendiri oleh perorangan ataupun suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi dapat berupa *interview* ataupun observasi. *Interview* yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan kepada narasumber di lapangan, sesuai dengan alur proses kegiatan yang mempengaruhi realisasi anggaran dana desa dan alokasi dana desa.

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan juga dari karya ilmiah seperti jurnal, tesis, disertasi.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Camat Donorojo, kepala urusan pemerintahan Kecamatan Donorojo, kepala desa di lingkungan Kecamatan Donorojo, Perangkat Desa di lingkungan Kecamatan Donorojo, dan Tokoh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Donorojo.

Metode Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2005) pertimbangan penggunaan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yaitu menyesuaikan metode kualitatif karena lebih mudah apabila dihadapkan dengan kenyataan jamak, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan informan, dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman informasi yang diteliti.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan terhadap sumber-sumber yang relevan, akurat dan realistis. Adapun metode pengumpulan data secara lebih jelas adalah sebagai berikut:

1. Metode wawancara dilakukan untuk mendapat data primer dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan wawancara terstruktur untuk mendapat penjelasan yang rinci mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran dana desa dan alokasi dana desa.
2. Metode dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini, yakni dengan cara mengumpulkan data yang terkait dan relevan dari berbagai lembaga. Selain hal tersebut dilakukan juga studi kepustakaan terhadap buku teks, jurnal, undang-undang ataupun peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

Metode Analisis

Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana morfologi dan struktur variabel penelitian serta tujuan penelitian yang semestinya dicapai. Menurut Moleong (2005) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Lebih lanjut analisis data kualitatif sebenarnya bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif maupun verifikasi kualitatif, strategi deskriptif kualitatif berintikan cara berpikir induktif dan deduktif. Penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu. Oleh karenanya, strategi ini dimulai dari pekerjaan klasifikasi data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komponensial yang merupakan teknik analisis data kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci. Kegiatan analisis dapat dimulai dengan menggunakan beberapa tahap yaitu:

1. Penggelaran hasil observasi dan wawancara. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan digelar dalam lembaran lembaran yang mudah dibaca, selanjutnya peneliti dapat melakukan editing terbatas.
2. Pemilahan hasil observasi dan wawancara. Hasil wawancara dan observasi setelah digelar dipilah menurut domain domain dan atau sub-domain tanpa harus mempersoalkan dari elemen mana sub-sub domain itu berasal dari elemen yang mana.

Validasi Data

Penelitian kualitatif, uji keabsahan data ditekankan pada uji validitas. Terdapat dua jenis validitas dalam penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2010:364). Penelitian ini menggunakan uji validitas internal (Uji Kredibilitas) dan uji validitas eksternal (Uji Tranferability).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Menurut Edward dalam Subarsono (2005)

dalam faktor komunikasi terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi. Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.
- b. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.
- c. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan DD dan ADD tidak dilaksanakan dengan menampung semua kepentingan masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat mengenai DD dan ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan DD dan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

Hubungan sumber daya dengan Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan DD dan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
- b. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan DD dan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan DD dan ADD.
- c. Kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan DD dan ADD.
- d. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan DD dan ADD berupa tenaga dan material.

Faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana DD dan ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai DD dan ADD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

Hubungan sikap pelaksana dengan Implementasi Kebijakan

Kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan DD dan ADD, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan ADD.
- b. Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADD, berupa penyusunan DURK dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Faktor penghambat dalam sikap pelaksanaan adalah kurang responnya para pelaksana ADD yang menganggap kebijakan ADD adalah sebuah kebijakan rutin belaka.

Hubungan struktur birokrasi dengan Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana ADD di semua desa, yaitu Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana DD dan ADD dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana DD dan ADD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Namun demikian pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desa di wilayah Kecamatan Donorojo adalah desa yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kedua peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan secara menyeluruh. Ketiga peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga belum optimal.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi serta lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahtiar, A. dan Iskandar, M. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, H. 1995. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

- Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi* (edisi kesembilan, jilid I). Jakarta : Erlangga
- Badan Pusat Statistik, 2015, *Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin 1970 s.d. 2013*, Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2016, *Persentase penduduk miskin yang berada di pedesaan dan perkotaan Indonesia Periode 1998-2013*, Jakarta